

HAMPIR SEMINGGU MENJABAT

Pj Wali Kota Bekasi Belum Bisa Tempati Rumah Dinas



RADEN GANI MUHAMMAD
Pj Wali Kota Bekasi

BEKASI (IM)- Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad belum bisa menempati rumah dinas yang sudah hampir seminggu menjabat sejak dilantik pada Rabu (20/9) lalu.

Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya telah menyiapkan rumah dinas untuk Gani di Perumahan Villa Meutia Kirana, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

"Rumah dinas Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani saat ini sudah dipersiapkan di Villa Meutia Kirana, setelah dilakukan survei ke beberapa perumahan lainnya seperti Perumahan Jaka Permai, Grand Galaxy, Perumahan Summarecon, Perumahan Kemang Pratama dan Villa Meutia Kirana," kata Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi, Imas Asiah, dikutip dari keterangannya, Selasa (26/9).

Imas mengatakan, saat ini, Pemkot tidak memiliki rumah dinas khusus untuk kepala daerah maupun wakil kepala daerah sehingga disediakan anggaran untuk biaya sewa rumah jabatan atau dinas.

Setelah melengkapi pembayaran, tahapan pengadaan sewa untuk rumah dinas itu

melalui proses yang panjang. Pemkot juga harus menyiapkan perlengkapan, peneraan, serta kebersihan rumah. Oleh karena itu, Gani belum bisa menempati rumah dinas.

"Setelah rapi proses administrasinya, Pak Pj Wali Kota dapat segera menempati rumah dinas yang sudah dipersiapkan," kata Imas.

Selain itu, persiapan dokumen kontrak juga diperlukan agar pengadaan rumah dinas tidak melanggar ketentuan. "Perjanjian kontrak yang sudah disusun, dikordinasikan dan diastensikan dengan Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian PBJ. Intinya rumah dinas saat ini sudah ada dan disiapkan Pemkot," ujar Imas.

Penyediaan rumah jabatan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya beserta biaya pemeliharaan. ● yan

IDN/ANTARA



PENYALURAN KUR UMKM

Perajin menata kerajinan dari bambu saat pameran UMKM di Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/9). Kementerian Koperasi, dan Usaha, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) memastikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh perbankan yang telah ditunjuk harus tanpa agunan, untuk mempermudah para pelaku UMKM.

KPAI: Sistem Pencegahan Prostitusi Anak Dinilai Nihil

JAKARTA (IM)- Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra menilai, hingga saat ini belum ada sistem yang bisa mencegah anak-anak agar tak terjerumus dalam prostitusi online.

Menurut dia, ada rangkaian masalah yang tidak selesai dari permasalahan anak-anak ini. Prostitusi, kata dia, hanya puncak dari masalah tersebut yang sebelumnya tidak tertangani. "Sebenarnya kita ini sedang berperan menjadi pemadam kebakaran. Kita belum bicara membangun sistem dalam mencegahnya dalam melihat pengasuhan anak di era digital," ucap Jasra, dikutip Selasa (26/9).

Saat ini, kata Jasra, masyarakat Indonesia tengah menghadapi pemiskinan generasi yang dipercepat melalui industri candu, termasuk prostitusi online. Hal ini ia simpulkan setelah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyimpulkan penyebab kemiskinan ekstrem adalah stunting dan pernikahan dini yang menurunkan semua kualitas hidup. "Sehingga perlu kebijakan payung untuk menembusnya. Dengan cara memastikan pengasuhan anak sejak dari rumah," ucap Jasra.

"Memastikan pengasuhan ada di keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah," kata dia lagi.

Seperti diketahui, baru-baru ini polisi menangkap seorang muncikari berinisial

FEA (24) yang "menjajakan" 21 anak kepada pria hidung belang. Anak-anak itu ditawarkan melalui media sosial. "Karena bicara UU Perlindungan Anak, tidak bisa berdiri sendiri. Harus dilengkapi dengan RUU Pengasuhan Anak. Ini darurat," ucap Jasra.

Menurut Jasra, RUU ini akan mengatur bagaimana orang tua menyerahkan pengasuhan dan perlindungan pada anaknya di era digital, serta bagaimana digital memiliki tanggung jawab bersama soal pengasuhan anak.

"Ini sangat besar masalahnya, dan tidak bisa sekadar ditangani seperti sekarang. Harus ada upaya luar biasa, menyelamatkan anak-anak kita," kata Jasra.

Pasalnya, kata Jasra, dalam bisnis prostitusi itu ada berbagai pihak yang menerobos dan berupaya melakukan manipulasi seksual atau grooming, lalu mendekati anak dengan masuk ke ranah daring pribadi anak. "Korban-korban yang kita tangani hari ini adalah korban yang berasal dari pelaku yang tidak bisa disentuh atau cegah. Anak-anak kita temukan ketika sudah menjadi korban," ungkap Jasra. Jasra melihat, anak-anak yang dikorbankan dalam prostitusi online seringkali merupakan anak-anak yang telah kehilangan figur berlapak. "Karena tidak bisa diselamatkan, mulai dari tingkat keluarga, sekolah dan lingkungan terdekatnya. Yang akhirnya direbut bisnis prostitusi," ucap Jasra. ● yan

4 | Metropolis



IDN/ANTARA

AKSI HARI TANI NASIONAL 2023

Penari menari saat aksi unjuk rasa dalam rangka Peringatan Hari Tani Nasional 2023 di Jakarta, Selasa (26/9). Dalam aksinya mereka menyuarakan sejumlah tuntutan diantaranya pembentukan reformasi agraria sebagai pengaruh pelaksanaan reformasi agraria sejati serta mendorong RUU Reforma Agraria dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

PINDAH KE RUSUN NAGRAK

Warga Kampung Bayam Akan Difasilitasi Antar Jemput Pelajar

Korban penggusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) ini telah direlokasi ke rusun Nagrak pada Selasa (26/9). Tawaran relokasi disepakati lantaran anak sekolah akan disiapkan fasilitas pengantaran dari Rusun Nagrak ke kawasan JIS, ujar Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang menjadi pendamping warga eks Kampung Bayam, Mirnawati.

JAKARTA (IM)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disebut akan memfasilitasi warga Kampung Bayam dengan trans-

portasi antar jemput pelajar setelah tinggal di Rumah Susun (Rusun) Nagrak, Jakarta Utara.

Sebagai informasi, warga

korban penggusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) telah direlokasi ke rusun tersebut pada Selasa (26/9).

"Sepakat tawaran relokasi lantaran anak sekolah akan disiapkan fasilitas pengantaran dari Rusun Nagrak ke kawasan JIS," ujar Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang menjadi pendamping warga eks Kampung Bayam, Mirnawati dalam keterangannya, Selasa (26/9).

"Nantinya setelah dari JIS mereka (para anak eks Kampung Bayam) itu bisa menyebar ke lokasi masing-masing sekolah," katanya lagi.

Mirnawati berujar, selama ini warga eks Kampung Bayam juga telah berupaya

mandiri mencari unit hunian di rusun, namun tidak dapat.

Selain itu, warga juga disebut butuh waktu untuk mempertimbangkan ajukan tawaran relokasi dari Pemprov DKI Jakarta. "Selama sepekan bolak-balik negosiasi. Kami sepekat mau (direlokasi) karena fasilitas transportasi," ucap Mirnawati.

Sementara itu, Lurah Papangko, Tomi Haryono mengemukakan, warga yang direlokasi sebanyak 19 KK. Mereka akan ditempatkan di Blok C lantai 12 dan 13 yang telah disiapkan.

"Setelah mereka pindah akan lanjut proses penataan trotoar di lokasi," ucap Tomi. Untuk diketahui, JIS men-

jadi satu dari empat stadion yang menjadi venue Piala Dunia U-17 yang berlangsung November-Desember 2023.

Selain JIS, ada tiga stadion yang juga disiapkan untuk Piala Dunia U-17 mendatang, yakni Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Bung Tomo, dan Stadion Manahan.

PSI pun telah mengusulkan kepada FIFA agar tim nasional Indonesia dapat mengemukakan, warga yang direlokasi sebanyak 19 KK. Mereka akan ditempatkan di Blok C lantai 12 dan 13 yang telah disiapkan.

"Setelah mereka pindah akan lanjut proses penataan trotoar di lokasi," ucap Tomi.

Untuk diketahui, JIS men-

Cegah Korupsi, Pemprov DKI Disarankan Ganti KTP DKI ke DKJ dalam Bentuk Digital

JAKARTA (IM)- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, pergantian KTP DKI ke DKJ setelah Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota memicu korupsi. Sebab, pergantian KTP untuk warga itu tentu membutuhkan biaya pengadaan blanko yang nilainya cukup besar. "Kalau pakai (perubahan KTP) itu kan anggarannya membengkak nanti potensi korupsi lagi nanti," ujar Trubus saat di-

hubunginya pada Selasa (26/9). Menurut Trubus, Pemprov DKI Jakarta bisa mengubah KTP warga dalam bentuk digital yang tidak memakan anggaran besar untuk pengadaan blanko.

"Paling penting menurut saya kalau mau seperti itu kenapa tidak diganti saja sistem KTP digital. Kalau digital KTP dan KK, masyarakat butuh, mudah," ucap Trubus.

Trubus sebelumnya menilai bahwa pergantian KTP DKI ke DKJ bukanlah sesuatu yang sangat penting. "Tidak ada urgensinya, karena KTP itu daftarnya NIK-nya. Kalau nomornya sama, ya sama saja KTP itu," ujar Trubus.

Menurut Trubus penerapan perubahan nama pada KTP dari DKI ke DKJ dapat diterapkan pada generasi gen Z yang baru akan membuat identitas. "Kalau orang yang sudah memiliki KTP lama, DKI dan DKJ itu kan sama saja. Tidak ada efek apa apa. Malah jadi ribet ngurus ke sana dan sini untuk mengganti," ucap Trubus.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI menyebut seluruh warga Jakarta harus mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah Ibu Kota resmi berpindah pada 2024. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menjelaskan, pencetakan ulang KTP warga

tidak akan dilakukan dalam rangka penyesuaian status Jakarta, ketika tidak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). "Ya (KTP) itu kan pasti berubah, kan Daerah Khusus Ibu Kota jadi Daerah Khusus Jakarta. Tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas," ujar Joko di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9) lalu.

Meski begitu, Joko menegaskan bahwa pergantian KTP tersebut masih menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta. Sebab, beleid tersebut yang akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dan melaksanakan pergantian KTP. "Nanti kami akan sosialisasi, karena RUU-nya juga sedang dalam proses penyelesaian. Jadi nanti di-print ulang saja. Anggaran dan blankonya kami siap toh, kan itu masih tahun depan," kata Joko. ● yan

bagal dilakukan dalam rangka penyesuaian status Jakarta, ketika tidak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

"Ya (KTP) itu kan pasti berubah, kan Daerah Khusus Ibu Kota jadi Daerah Khusus Jakarta. Tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas," ujar Joko di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9) lalu.

Meski begitu, Joko menegaskan bahwa pergantian KTP tersebut masih menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta. Sebab, beleid tersebut yang akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dan melaksanakan pergantian KTP. "Nanti kami akan sosialisasi, karena RUU-nya juga sedang dalam proses penyelesaian. Jadi nanti di-print ulang saja. Anggaran dan blankonya kami siap toh, kan itu masih tahun depan," kata Joko. ● yan

Kaesang Siap Maju Pilkada Depok

DEPOK (IM)-Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo menyebut Kaesang Pangarep siap bertarung dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Depok 2024. Sigit mengklaim putra bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu mengaku siap jika harus mengikuti pemilihan Wali Kota Depok 2024. "Bro Kaesang sendiri yang menyatakan siap jika PSI meminta maju di Pilkada Depok," kata Sigit, Selasa (26/9).

Kaesang dilantik sebagai Ketua Umum PSI kemarin. Padahal, dia baru saja resmi menjadi kader PSI pada Sabtu, 23 September 2023. PSI telah lama menyatakan dukungannya mengukung Kaesang dalam Pilkada Depok 2024 sebelum suami Erina Gudono itu menjadi Ketua Umum PSI.

Meski yakin menyodorkan nama Kaesang dalam Pilkada Depok, PSI harus melihat dulu perolehan kursi di DPRD Depok pasca Pemilu 2024. Jika jumlah kursi di DPRD mencukupi, maka peluang Kaesang

memperebutkan jabatan Wali Kota Depok akan semakin besar. "Jika PSI setelah Pemilu 2024 memiliki kursi yang cukup di DPRD Depok, tentu akan lebih mudah untuk mencalonkan Bro Kaesang," ujar Sigit.

PSI pun membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung mengukung Kaesang. Sebab, Sigit berujar, tidak mungkin partainya sendirian berjuang memenangkan Kaesang di Pilkada Depok. Dia melanjutkan, PSI Depok sedari awal sudah mengajak semua kekuatan nasionalis untuk bersama-sama memenangkan Kaesang sebagai wali kota. Namun, hingga Kaesang berlabuh ke PSI, belum ada partai lain yang mau membentuk koalisi.

Padahal, Sigit mengaku senang jika kekuatan nasionalis di Depok bergabung dan mengalahkan rezim yang berkuasa saat ini. "PDIP sebagai partai nasionalis paling senior, tentu akan kami sambut dengan senang hati jika berkenan bergabung," ucap Sigit. ● yan

Kadishub DKI: Jakarta Tetap Padat Meskipun Tak Lagi Jadi Ibukota

JAKARTA (IM)- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo memprediksi arus lalu lintas di kota Jakarta akan tetap padat meskipun nantinya berubah dari DKI (Daerah Khusus Ibukota) menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

"Jika melihat jumlah pekerjaan, pegawai negeri di Jakarta secara keseluruhan itu hanya 5 persen dari jumlah pekerja yang beraktivitas di Jakarta. Jadi artinya, jika 5 persen itu pindah, kondisi traffic masih tetap cukup padat," ujar Syafrin, Selasa (26/9).

Syafrin mengungkapkan, jumlah pegawai negeri yang beraktivitas di Jakarta hanya 5 persen dari total traffic yang ada di ibukota Jakarta. Sehingga sebagai kota pusat perekonomian dan jasa, disebut Syafrin Jakarta sebagai DKJ akan padat dengan berbagai aktivitasnya.

"Ya karena kegiatannya

tetap tinggi untuk jasa dan lain sebagainya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditargetkan rampung pada akhir tahun ini (Desember 2023).

Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media di Kawasan Pelataran GBK Senayan Jakarta Pusat pada Jumat (22/9). "Kemarin waktu rapat di Pak Presiden sih katanya Desember ya. Tapi kita serahkan mekanisme itu kewenangan dari Pak Mendagri," ujar Heru.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut Heru menjadi pihak yang paling dapat menjelaskan terkait RUU DKJ.

"Sedang dibahas di Kemendagri, kan saya serahkan aja ini ke Kemendagri kegiatan time table-nya," jelas Heru. ● yan



BANTUAN AIR BERSIH UNTUK WARGA BEKASI

Sejumlah warga menggunakan mesin pompa air untuk mendistribusikan bantuan air dari kendaraan Armoured Water Cannon (AWC) Polda Metro Jaya di Perumahan Bali Indah, Desa Setia Mulya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (26/9). Menurut warga selama 14 hari di wilayah itu kesulitan mendapatkan air bersih pada musim kemarau akibat matinya saluran air PDAM dan terpaksa menggunakan air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.